

TRANSFORMASI KONSEPTUAL MASYARAKAT KONTEMPORER: DIALEKTIKA NEOMODERNISME DAN POSTMODERNISME TERHADAP RASIONALITAS DAN EMANSIPASI SOSIAL DI ERA DIGITAL

Aisyah Nur¹, Devina Novela², Rahma Dona³, Mei Arina Ilmi AS⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, ⁴Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Email: aisyahnb30401@gmail.com¹, devinanovela16@gmail.com²,
nhaanhaa292@gmail.com³, arinailmi113@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to philosophically examine the crisis of rationality and the challenges of social emancipation in the digital society through a dialectical approach between neomodernism and postmodernism. Against the backdrop of the growing dominance of instrumental rationality in digital ecosystems which marginalizes ethical, reflective, and participatory dimensions this study explores two major schools of contemporary social philosophy. Neomodernism, through Jürgen Habermas' theory of communicative rationality, emphasizes rational discourse and consensus as the basis for a just social order. In contrast, postmodernism, as represented by Michel Foucault and Jean-François Lyotard, rejects universalist claims and deconstructs the role of power in the production of truth and representation. Employing a qualitative-philosophical method and philosophical discourse analysis, this research engages with primary texts from key thinkers as well as secondary literature on algorithmic technology, digital democracy, and global structural inequalities. The findings reveal that while normative neomodernist and postmodern deconstructive approaches are each insightful, neither alone is sufficient to address the complexity of contemporary crises. Accordingly, the study proposes a dialectical synthesis: a model of dialogical-pluralistic emancipation that integrates communicative ethics with the recognition of narrative particularity to form a more reflective, contextual, and transformative mode of social critique.

Keywords: *rationality, social emancipation, neomodernism, postmodernism, digital society, social critique, algorithms, communication*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis krisis rasionalitas dan tantangan emansipasi sosial dalam masyarakat digital kontemporer melalui dialektika antara neomodernisme dan postmodernisme. Berangkat dari dominasi rasionalitas instrumental yang semakin menguat dalam ekosistem digital yang mengaburkan dimensi etis, reflektif, dan partisipatif kajian ini mengeksplorasi dua pendekatan filsafat sosial kontemporer. Neomodernisme, melalui gagasan rasionalitas komunikatif Habermas, mengedepankan pentingnya diskursus rasional dan konsensus sebagai landasan tatanan sosial yang adil. Sebaliknya, postmodernisme, melalui pemikiran Foucault dan Lyotard, menolak klaim universal dan membongkar dimensi kuasa dalam produksi kebenaran dan representasi. Menggunakan pendekatan kualitatif filosofis dan metode analisis wacana filosofis, penelitian ini menelaah karya-karya utama dari kedua aliran serta literatur sekunder terkait teknologi algoritmik, demokrasi digital, dan struktur sosial global. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan normatif neomodernis dan kritik dekonstruktif postmodernis sama-sama diperlukan namun belum cukup jika dipisahkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model sintesis dialektis berbasis emansipasi dialogis-pluralistik yang mampu menanggapi kompleksitas krisis sosial

kontemporer. Sintesis ini memadukan etika komunikasi dengan pengakuan partikularitas naratif untuk membentuk kritik sosial yang lebih reflektif, kontekstual, dan transformatif.

Kata Kunci: *rasionalitas, emansipasi sosial, neomodernisme, postmodernisme, masyarakat digital, kritik sosial, algoritma, komunikasi,*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat kontemporer, transformasi sosial tidak hanya berlangsung dalam bentuk perubahan struktural dan teknologi, melainkan juga dalam cara manusia memahami makna, kebenaran, dan rasionalitas. Krisis ekologis, alienasi sosial, serta dominasi teknologi digital merupakan penanda krisis multidimensional yang berakar pada dominasi rasionalitas instrumental suatu pola pikir yang mengutamakan efisiensi dan kalkulasi teknis dalam setiap tindakan. Rasionalitas jenis ini, yang awalnya lahir dari proyek modernitas, kini justru menjadi penyebab kekosongan eksistensial karena mereduksi manusia menjadi elemen fungsional dalam sistem ekonomi dan digital yang bersifat teknokratis (Harvey, 2023; Bowden, 2018; Zuboff, 2019).

Kehidupan masyarakat kini dipandu oleh logika data, algoritma, dan pengawasan sistemik yang secara perlahan membentuk struktur kesadaran dan relasi sosial. Subjektivitas manusia dikonstruksi oleh sistem otomatis yang tidak sepenuhnya disadari, menghasilkan pengalaman hidup yang makin terdiferensiasi namun miskin refleksi (Harari, 2016). Dalam konteks ini, transformasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari transformasi epistemologis dan ontologis yang membutuhkan telaah filosofis yang lebih kritis dan mendalam. Alih-alih memperluas ruang deliberasi dan kontemplasi, teknologi digital justru mempersempit horizon makna melalui kurasi algoritmik dan segmentasi sosial, yang pada gilirannya memperlemah kapasitas emansipasi individu.

Di tengah situasi ini, Neomodernisme hadir sebagai upaya penyelamatan terhadap proyek modernitas melalui rehabilitasi konsep rasionalitas. Tokoh sentral seperti Jürgen Habermas berargumen bahwa rasionalitas tidak harus dimaknai secara teknokratik, melainkan perlu dikembalikan ke bentuk rasionalitas komunikatif yang berbasis pada dialog, pengakuan timbal balik, dan konsensus etis dalam ruang publik (Habermas, 1984; Merawi, 2023). Rasionalitas komunikatif menjadi dasar bagi tatanan sosial yang adil dan demokratis, yang memungkinkan terjadinya emansipasi sosial melalui interaksi antar subjek yang setara. Dalam kerangka ini, tindakan sosial tidak dilandasi oleh kalkulasi

utilitarian semata, tetapi oleh proses pemahaman yang melibatkan dimensi moral dan reflektif.

Sementara itu, postmodernisme menantang klaim universalitas rasionalitas modern dan membuka dimensi kuasa yang tersembunyi dalam proyek modernitas. Bagi Foucault (1980), rasionalitas modern adalah produk dari praktik kuasa yang menciptakan norma dan deviasi. Pengetahuan, dalam kerangka ini, tidak netral, melainkan sarat dengan strategi legitimasi kekuasaan. Lyotard (1979) menambahkan bahwa era postmodern ditandai oleh runtuhnya narasi besar, termasuk rasionalitas universal, dan digantikan oleh narasi-narasi kecil yang lokal, partikular, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pengakuan terhadap identitas-identitas marginal dan narasi alternatif yang selama ini disingkirkan oleh struktur dominan (Castillo & Pueyo, 2023; Muhamba & Francis, 2023).

Meskipun kedua pendekatan ini menawarkan kerangka kritik yang kuat, masing-masing juga memiliki keterbatasan. Neomodernisme sering dikritik karena terlalu normatif dan kurang sensitif terhadap dinamika kuasa yang tersembunyi dalam struktur sosial. Di sisi lain, postmodernisme kerap terjebak dalam relativisme yang melumpuhkan posisi etis dan melemahkan kemungkinan aksi kolektif. Padahal, krisis kontemporer menuntut pendekatan yang tidak hanya mampu mendekonstruksi, tetapi juga menyusun ulang kerangka berpikir secara konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sintesis yang memadukan kekuatan normatif rasionalitas komunikatif Habermas dengan sensitivitas dekonstruktif ala Foucault dan Lyotard. Pendekatan dialektis semacam ini dibutuhkan untuk membentuk kritik sosial yang tidak hanya analitis, tetapi juga transformatif dan aplikatif.

Tinjauan atas literatur kontemporer menunjukkan bahwa dialog antara neomodernisme dan postmodernisme masih jarang dilakukan secara produktif. Sebagian besar kajian hanya menempatkan kedua tradisi ini dalam posisi oposisi biner tanpa upaya sintesis atau rekonstruksi konseptual yang lebih luas (Zeli, 2024; Muhamba & Francis, 2023). Di sisi lain, tantangan nyata seperti krisis iklim, dominasi AI dan algoritma, serta ketimpangan digital global menunjukkan bahwa model kritik sosial lama tidak lagi memadai. Konteks ini menuntut pembaruan konseptual dalam memahami relasi antara rasionalitas, kekuasaan, dan emansipasi sosial dalam kerangka masyarakat digital kontemporer.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual baru yang bersifat dialektis, sintetik, dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk: (1) Mengkritisi secara filosofis model rasionalitas dalam Neomodernisme dan Postmodernisme; (2) Membandingkan pendekatan emansipasi sosial yang ditawarkan masing-masing aliran; dan (3) Mengusulkan kerangka kritik sosial alternatif yang relevan dengan kondisi masyarakat digital saat ini. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritik, tetapi juga praksis yakni dengan membangun jembatan antara ranah pemikiran dan kondisi sosial factual demi merumuskan bentuk transformasi masyarakat yang lebih manusiawi, reflektif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif filosofis dengan karakter normatif-teoritis, yang difokuskan pada eksplorasi dan interpretasi mendalam atas konsep-konsep abstrak seperti rasionalitas, kekuasaan, emansipasi, dan transformasi sosial dalam konteks era digital. Fokus utama bukan pada pembuktian empiris, melainkan pada konstruksi konseptual dan sintesis kritis yang dapat memperkaya diskursus filsafat sosial kontemporer. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu merumuskan kerangka kritik sosial alternatif berbasis pada dialog dialektis antara neomodernisme dan postmodernisme.

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis dengan metode Philosophical Discourse Analysis. Teknik ini menekankan pada pembacaan kritis terhadap struktur argumen dan narasi filosofis dalam karya-karya primer dan sekunder. Karya-karya utama yang dianalisis antara lain: *The Theory of Communicative Action* dan *Between Facts and Norms* oleh Jürgen Habermas, *Power/Knowledge* dan *The Archaeology of Knowledge* oleh Michel Foucault, *The Postmodern Condition* oleh Jean-François Lyotard, *Eclipse of Reason* oleh Max Horkheimer, serta *Of Grammatology* oleh Jacques Derrida. Kajian ini diperkuat oleh sumber-sumber sekunder dari jurnal terindeks seperti Scopus, JSTOR, Springer, dan Taylor & Francis, yang mencakup isu-isu tentang teori kritis, algoritmisasi sosial, kapitalisme digital, dan demokrasi deliberatif (Bilić, 2018; Taffel, 2021; Shaw & Donia, 2021; Hjelholt, 2024; Scheel, 2024; Xia, 2021).

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dalam tiga fase utama. Pertama, dilakukan reduksi teks untuk mengidentifikasi dan menyeleksi argumen-argumen sentral dari masing-masing tokoh dan aliran pemikiran. Kedua, data dikategorikan dan disusun

dalam matriks komparatif antara Neomodernisme dan Postmodernisme guna memetakan perbedaan dan potensi sintesis konseptual, khususnya terkait isu rasionalitas dan emansipasi sosial. Ketiga, dilakukan sintesis kritis untuk merumuskan pemahaman baru melalui pendekatan *critical integrative synthesis* (Afshari et al., 2023), dengan mempertimbangkan koherensi filosofis, relevansi kontekstual, dan kemungkinan aplikasi praktis dalam masyarakat digital (Drisko, 2019; Evans et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan tiga parameter utama dalam analisis: (1) struktur konseptual mengenai rasionalitas dan epistemologi, (2) konfigurasi relasi kuasa dan teknologi dalam masyarakat digital, dan (3) model emansipasi sosial dalam perspektif pluralistik. Untuk menilai dinamika emansipasi kontemporer secara lebih tajam, digunakan pendekatan teoritik tambahan seperti *recognition theory* (Talseth & Gilje, 2018), *pluralistic emancipation* (Limenih & Nouvet, 2024), serta *democratic agonism* (Ratcliffe et al., 2020; Orchard et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasionalitas Instrumental dalam Kritik Filsafat Kontemporer

Dalam lintasan sejarah modernitas, rasionalitas awalnya dimaknai sebagai kekuatan emansipatoris yang membebaskan manusia dari dogma, mitos, dan dominasi tradisi feodal. Rasionalitas diyakini mampu menjadi motor kemajuan, pencerahan, dan keadaban melalui pemanfaatan nalar universal (Horkheimer, 1947). Namun, sebagaimana dikritik oleh Mazlish (2021), proyek rasionalitas ini mengalami degenerasi ketika dijadikan landasan bagi ekspansi teknokratis, kolonialisme, dan eksploitasi. Dalam konteks kontemporer, bentuk degeneratif tersebut termanifestasi dalam apa yang disebut rasionalitas instrumental, yakni model berpikir yang menilai segala tindakan semata-mata dari aspek efisiensi, utilitas, dan kalkulasi strategis (Zheng & Guinote, 2022).

Rasionalitas instrumental telah menjadi kerangka dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme lanjut, birokrasi negara modern, dan logika teknologi digital. Hal ini menyebabkan peminggiran dimensi etis, reflektif, dan afektif dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, sistem pendidikan, pelayanan publik, dan bahkan relasi sosial kini dinilai melalui angka kuantitatif, ranking, dan performativitas metrik semata (Bowden, 2018; Zuboff, 2019). Dalam masyarakat algoritmik, pilihan subjek terhadap konten, relasi sosial, bahkan opini politik diarahkan oleh sistem data-driven yang bekerja berdasarkan

asumsi efisiensi dan prediktabilitas (Harari, 2016; Scheel, 2024). Ini menciptakan masyarakat yang "datafikasi-nya" sangat tinggi namun refleksivitasnya rendah.

Habermas (1984), dalam kerangka Neomodernisme, menyebut gejala ini sebagai bentuk kolonisasi terhadap *lifeworld* yakni dunia kehidupan yang menjadi fondasi intersubjektif pembentukan makna dan norma sosial. Ketika rasionalitas sistemik menggantikan rasionalitas komunikatif, maka relasi sosial tidak lagi dibangun atas dasar saling pengertian, tetapi berdasarkan prosedur dan mekanisme kontrol. Erosi terhadap ruang publik deliberatif menjadi dampak langsung dari dominasi nalar teknis ini (Pillay & Pillay, 2021).

Berbeda dengan Habermas yang masih menyalakan harapan atas proyek modernitas, Foucault (1980) dan Lyotard (1979) dari kubu postmodernis lebih radikal dalam melihat bahwa rasionalitas bukan hanya mengalami distorsi, tetapi sejak awal adalah alat kekuasaan. Pengetahuan, menurut Foucault, bukanlah hasil netral dari pencarian kebenaran, melainkan produk dari rezim wacana yang menentukan apa yang boleh dikatakan, siapa yang boleh berbicara, dan bentuk mana dari nalar yang dianggap sah (Heyssse, 2023). Lyotard, dengan gagasannya tentang *the incredulity toward metanarratives*, menolak klaim bahwa rasionalitas universal dapat dijadikan acuan tunggal bagi masyarakat heterogen. Baginya, yang justru dibutuhkan adalah pengakuan atas narasi-narasi kecil (*petit récits*) yang plural, lokal, dan kontekstual (Ward & Budarick, 2020; Averina & Hlebova, 2022).

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun baik neomodernisme maupun postmodernisme menolak dominasi rasionalitas instrumental, pendekatan mereka sangat berbeda. Habermas percaya pada revitalisasi ruang diskursif sebagai sarana emansipasi, sementara Foucault dan Lyotard mengungkap bahwa ruang diskursif itu sendiri kerap kali sudah termanipulasi oleh logika kekuasaan yang menyamar sebagai rasionalitas. Oleh karena itu, kritik terhadap rasionalitas instrumental harus melibatkan kesadaran akan dua hal: pentingnya diskursus etis sebagai jalan keluar (Habermas), dan kewaspadaan terhadap struktur dominasi yang tersembunyi dalam narasi rasional itu sendiri (Foucault & Lyotard).

Dalam era digital, dominasi rasionalitas instrumental mencapai puncaknya dalam bentuk *algorithmic governance*, di mana pengambilan keputusan sosial dan politik bergeser dari aktor manusia ke sistem teknis yang tidak deliberatif (Bilić, 2018; Taffel,

2021). Ini menuntut pengembangan pendekatan sintetik yang tidak hanya mengkritik rasionalitas instrumental, tetapi juga menawarkan kerangka alternatif yang reflektif, partisipatif, dan terbuka terhadap pluralitas. Pendekatan tersebut menjadi penting agar filsafat sosial tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara konseptual maupun praksis.

2. Model Emansipasi Sosial: Dialektika antara Konsensus dan Dekonstruksi

Dalam upaya menjawab krisis rasionalitas dan dominasi sistemik yang semakin kompleks, perdebatan filsafat kontemporer memperlihatkan ketegangan antara dua model utama emansipasi sosial: model normatif-rasional berbasis konsensus sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas dalam tradisi neomodernisme, dan model dekonstruktif-pluralistik ala Jean-François Lyotard yang khas postmodernisme.

Habermas (1984), dalam *The Theory of Communicative Action*, menyatakan bahwa rasionalitas harus dikembalikan ke bentuk komunikatifnya yakni rasionalitas yang muncul dari interaksi dialogis antar-subjek dalam ruang publik yang bebas dari dominasi. Dalam model ini, emansipasi sosial dicapai bukan melalui rekayasa sistemik atau revolusi politik, tetapi melalui pembentukan konsensus etis yang dihasilkan dari diskursus bebas, setara, dan reflektif. Partisipasi dalam diskursus menjadi sarana pembebasan, sebab melalui komunikasi yang tidak terdistorsi, individu dapat menyuarakan kepentingan mereka dan bersama-sama membangun norma yang disepakati secara intersubjektif (Honneth, 2018; Levin, 2019).

Model ini menjadikan ruang publik deliberatif sebagai arena utama emansipasi, di mana legitimasi sosial dibangun secara rasional. Oleh karena itu, menurut Habermas, keadilan tidak hanya menyangkut distribusi material, tetapi juga pengakuan simbolik atas eksistensi dan pendapat setiap warga dalam proses diskursus (Habermas, 1996; Merawi, 2023). Model ini cocok diterapkan dalam institusi demokrasi deliberatif dan pendidikan kewargaan yang menekankan literasi dialogis.

Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Lyotard (1979), dalam *The Postmodern Condition*, memperingatkan bahwa konsensus rasional yang digagas Habermas berisiko menjadi bentuk baru dari hegemoni epistemik. Konsep *differend* yang ia kembangkan merujuk pada situasi di mana klaim-klaim keadilan dari kelompok tertentu tidak dapat diungkapkan dalam kerangka bahasa dominan, sehingga mereka tidak

hanya termarginalisasi secara sosial, tetapi juga terbungkam secara epistemologis (Ward & Budarick, 2020; Averina & Hlebova, 2022).

Dalam konteks ini, Lyotard menolak narasi besar tentang emansipasi universal. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya afirmasi terhadap narasi-narasi kecil dan particular yakni pengalaman dari kelompok minoritas, subaltern, atau identitas yang selama ini terpinggirkan oleh sistem representasi formal. Emansipasi, menurut pendekatan ini, bukanlah hasil dari konsensus normatif, melainkan dari pengakuan terhadap pluralitas dan konflik yang tak terselesaikan secara tuntas. Dengan demikian, bentuk keadilan sosial yang ditawarkan lebih bersifat agonistik dan kontestatif daripada harmonis (Fenton, 2021; O'Byrne, 2020).

Perbedaan mendasar antara dua pendekatan ini terletak pada definisi keadilan dan cara mencapainya. Neomodernisme percaya bahwa kesetaraan dan pengakuan dapat dibangun melalui prosedur rasional yang bersifat inklusif, sementara postmodernisme memandang bahwa setiap prosedur rasional selalu memuat kemungkinan eksklusi simbolik. Dengan kata lain, rasionalitas yang dianggap netral pun berpotensi mereproduksi kekuasaan dalam bentuk simbolik yang halus (Lyotard, 1979; Sevim et al., 2025).

Namun, sintesis antara kedua pendekatan ini dapat memberikan model emansipasi sosial yang lebih reflektif dan adaptif. Abdullah & Chaudhry (2018) mengusulkan pendekatan dialogis-pluralistik yang menggabungkan etika diskursif Habermas dengan sensitivitas Lyotard terhadap partikularitas. Artinya, emansipasi tidak hanya bergantung pada keadilan prosedural, tetapi juga pada pengakuan terhadap narasi-narasi minor yang tidak selalu bisa diakomodasi dalam diskursus utama.

Model ini sejalan dengan gagasan *recognition theory* dari Honneth (2018), yang menekankan bahwa pembebasan sosial mencakup dimensi psikologis dan simbolik yakni kebutuhan untuk diakui sebagai subjek yang bermakna dan memiliki suara. Dalam kerangka ini, partisipasi sosial tidak cukup jika hanya bersifat formal; ia harus menjamin bahwa setiap individu merasa dihargai dan didengar dalam ruang publik. Prinsip ini juga dipertegas oleh pendekatan *pluralistic emancipation* (Limenih & Nouvet, 2024), yang menolak homogenisasi proyek pembebasan dan menekankan pentingnya kontekstualisasi setiap bentuk ketertindasan.

Dengan demikian, dialektika antara konsensus rasional dan dekonstruksi partikularitas bukanlah kontradiksi biner, tetapi medan kreatif untuk membentuk kerangka emansipasi sosial yang lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap kompleksitas masyarakat digital dan global. Dalam kerangka ini, bentuk-bentuk baru demokrasi seperti *citizen assembly*, deliberasi digital, dan platform interaktif yang etis dapat dijadikan sarana untuk mengartikulasikan keragaman aspirasi sosial secara setara dan produktif (Evans et al., 2023; Orchard et al., 2023).

3. Postmodernisme: Dekonstruksi Rasionalitas dan Wacana Kuasa

Postmodernisme hadir sebagai kritik radikal terhadap asumsi-asumsi dasar modernitas, terutama gagasan bahwa rasionalitas bersifat netral, universal, dan emansipatoris. Pemikir seperti Michel Foucault dan Jean-François Lyotard menunjukkan bahwa rasionalitas modern tidak bebas nilai, melainkan berfungsi sebagai alat legitimasi bagi struktur kekuasaan. Foucault (1980) dalam konsep “power/knowledge” menegaskan bahwa pengetahuan selalu terkait erat dengan kekuasaan; ia tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga memproduksi norma, membentuk subjektivitas, dan mengatur populasi. Rasionalitas modern, alih-alih membebaskan, menjadi instrumen untuk menormalisasi perilaku dan membentuk masyarakat yang patuh secara halus melalui institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan penjara (Foucault, 1977).

Dalam konteks digital, kritik ini menjadi semakin relevan. Sistem algoritmik yang diklaim sebagai “rasional” dan “netral” ternyata menyimpan bias struktural yang memperkuat ketimpangan sosial dan eksklusi epistemik. Seperti dijelaskan oleh Scheel (2024), algoritma menciptakan bentuk baru kekuasaan yang tidak kasat mata, di mana representasi digital kelompok marjinal disaring, disempitkan, atau dihapuskan dari ruang diskursus publik. Ini sejalan dengan temuan Bilić (2018), yang menekankan bahwa logika algoritmik menyusun ulang struktur partisipasi sosial berdasarkan logika pasar, bukan prinsip keadilan atau pengakuan.

Lyotard (1979) memperluas kritik ini dengan mengembangkan konsep *differend*, yaitu situasi di mana dua pihak berkonflik tetapi tidak memiliki kerangka bahasa yang sama untuk menyelesaikannya secara adil. Dalam *The Postmodern Condition*, ia menolak metanarasi narasi besar seperti sains, kemajuan, atau rasionalitas universal yang menurutnya telah gagal merepresentasikan kompleksitas realitas kontemporer. Ia menyerukan pengakuan atas narasi-narasi kecil (*petit récits*) yang bersifat lokal dan

partikular, terutama yang berasal dari kelompok minoritas, terpinggirkan, atau tak terwakili dalam struktur wacana dominan (Ward & Budarick, 2020; Averina & Hlebova, 2022).

Kritik postmodern terhadap klaim universal rasionalitas juga mencakup penolakan terhadap homogenisasi nilai dan pengalaman. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai kesamaan perlakuan dalam sistem abstrak, tetapi sebagai pengakuan terhadap keberagaman konteks, pengalaman, dan bahasa ekspresif (Fenton, 2021; O'Byrne, 2020). Wacana digital yang dikendalikan oleh korporasi teknologi sering gagal dalam menyediakan ruang semacam ini, karena lebih memilih konten yang dapat diprediksi dan menguntungkan secara komersial, yang sering kali mengesampingkan keragaman budaya dan politik.

Secara filosofis, pendekatan ini tidak bertujuan untuk meruntuhkan semua bentuk rasionalitas, tetapi untuk menunjukkan bahwa rasionalitas tidak bebas dari prasangka ideologis. Rasionalitas bukanlah entitas yang muncul dari ruang hampa, melainkan dibentuk secara historis, sosial, dan politis. Oleh karena itu, pendekatan postmodern mengajak kita untuk membaca kembali struktur epistemologis dalam masyarakat dengan kecurigaan *hermeneutics of suspicion* dan mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik apa yang dianggap sebagai "kebenaran objektif" (Heyssse, 2023; Sevim et al., 2025).

Namun, pendekatan postmodern juga menghadapi kritik karena cenderung menghasilkan relativisme ekstrem, yang melemahkan posisi normatif untuk menilai ketidakadilan. Jika semua narasi dianggap setara tanpa ukuran evaluatif, bagaimana kita bisa membedakan antara klaim yang menindas dan yang membebaskan? Di sinilah muncul kebutuhan akan sintesis dengan pendekatan normatif, seperti yang ditawarkan oleh neomodernisme, untuk menghindari nihilisme epistemologis (O'Byrne, 2020; Cern, 2019).

Dengan demikian, kontribusi postmodernisme dalam dekonstruksi rasionalitas dan wacana kuasa tetap penting sebagai kritik terhadap hegemoni epistemik yang sering tersembunyi dalam narasi besar modernitas. Dalam era digital, di mana sistem pengetahuan dikendalikan oleh infrastruktur teknologis yang kompleks, pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk mengungkap bagaimana teknologi tidak hanya menyusun ulang informasi, tetapi juga struktur kuasa dan pengalaman manusia.

4. Kebutuhan akan Sintesis Konseptual dalam Kritik Sosial

Perdebatan antara Neomodernisme dan Postmodernisme dalam ranah filsafat sosial kontemporer menghadirkan dua pendekatan yang sama-sama kritis terhadap dominasi rasionalitas instrumental, namun seringkali berjalan dalam jalur yang terpisah dan bahkan saling eksklusif. Neomodernisme, sebagaimana yang dikembangkan oleh Habermas, menawarkan kerangka rasionalitas komunikatif yang menekankan konsensus, intersubjektivitas, dan etika diskursif sebagai basis bagi keadilan sosial (Habermas, 1984; Merawi, 2023). Di sisi lain, Postmodernisme, melalui Foucault dan Lyotard, mengajukan kritik terhadap klaim universalitas dalam modernitas dengan menekankan pentingnya dekonstruksi kuasa dan pluralitas kebenaran lokal (Foucault, 1980; Lyotard, 1979; Ward & Budarick, 2020).

Namun, ketika dihadapkan pada kompleksitas realitas kontemporer seperti algoritmisasi masyarakat, polarisasi digital, dan krisis representasi sosial, kedua pendekatan tersebut tampak memiliki keterbatasan. Pendekatan neomodernis kerap dikritik karena terlalu mengandalkan asumsi rasionalitas ideal dan cenderung mengabaikan dinamika kuasa yang tidak simetris dalam struktur sosial (Vogelmann, 2021). Sementara itu, pendekatan postmodern dinilai terlalu dekonstruktif, sehingga sulit membentuk kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai landasan transformasi sosial yang terarah (O'Byrne, 2020; Averina & Hlebova, 2022).

Dari sinilah muncul kebutuhan mendesak akan sintesis konseptual yang mampu menggabungkan keunggulan analitis dan etis dari kedua pendekatan. Sintesis semacam ini harus bersifat dialektis tidak sekadar menjembatani dua kutub pemikiran, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif dengan sensitivitas terhadap keragaman dan kompleksitas sosial. Afshari et al. (2023) menyebut pendekatan ini sebagai *critical synthesis*, yaitu metode yang menggabungkan refleksi normatif dan dekonstruksi struktural untuk membentuk kerangka berpikir yang kontekstual, transformatif, dan aplikatif.

Dalam konteks ini, kerangka normatif dari Habermas tentang diskursus etis dan demokrasi deliberatif tetap relevan, terutama dalam menuntut transparansi, akuntabilitas, dan inklusi dalam ruang publik digital (Honneth, 2018; Levin, 2019). Namun kerangka ini perlu diperluas dengan kesadaran postmodern tentang bagaimana representasi, bahasa, dan algoritma dapat memproduksi eksklusi epistemik yang sistemik (Ward & Budarick,

2020; Scheel, 2024). Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, kritik sosial dapat diarahkan bukan hanya untuk menuntut keadilan prosedural, tetapi juga keadilan representasional yang lebih menyeluruh dan sensitif terhadap partikularitas konteks sosial.

Sintesis ini tidak hanya bersifat filosofis, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam desain kebijakan publik, misalnya, dibutuhkan kombinasi antara prinsip deliberatif (seperti citizen assembly dan forum publik) dengan mekanisme reflektif yang memperhatikan narasi-narasi marginal (Orchard et al., 2023). Di ruang digital, sintesis ini memungkinkan pengembangan etika algoritmik yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi atau fairness dalam pemrosesan data, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman minoritas yang kerap terpinggirkan oleh sistem komputasional dominan (Shaw & Donia, 2021; Place & Ciszek, 2021).

Secara epistemologis, pendekatan sintetik ini membuka jalan bagi formasi kritik sosial yang menghindari jebakan dualisme: antara objektivisme universal modernis dan relativisme fragmentaris postmodernis. Model pluralistic emancipation (Limenih & Nouvet, 2024) dan recognition theory (Talseth & Gilje, 2018) menjadi rujukan penting dalam membentuk pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap krisis-krisis kontemporer. Emansipasi tidak lagi dipahami sebagai proses homogenisasi atas dasar nalar tunggal, melainkan sebagai dialog terbuka antara berbagai horizon makna yang berakar pada pengalaman konkret, identitas sosial, dan posisi kekuasaan yang beragam.

Dengan demikian, kebutuhan akan sintesis konseptual bukan hanya merupakan keharusan teoretis, tetapi juga merupakan tuntutan praktis untuk membangun model kritik sosial baru yang mampu menjawab realitas kompleks masyarakat kontemporer secara lebih reflektif, etis, dan transformatif. Ini merupakan langkah penting menuju formulasi epistemologi digital dan filsafat sosial baru yang tidak lagi mengulang polarisasi lama, tetapi membuka kemungkinan praksis baru yang lebih dialogis dan pluralistik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer tengah mengalami transformasi konseptual yang mendalam, ditandai oleh krisis rasionalitas dan fragmentasi makna akibat dominasi sistem digital dan logika algoritmik. Rasionalitas instrumental yang semula dimaksudkan sebagai alat pembebasan justru berkembang menjadi instrumen hegemonik yang mereduksi subjektivitas manusia dalam kerangka efisiensi

dan kalkulasi teknis. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali dasar epistemologis dan normatif dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Neomodernisme, melalui gagasan rasionalitas komunikatif Habermas, menawarkan dasar normatif untuk revitalisasi ruang publik dan praktik diskursif yang setara. Sebaliknya, postmodernisme membuka kesadaran akan dimensi kuasa dan eksklusi yang tersembunyi di balik klaim rasionalitas universal, melalui kritik dekonstruktif terhadap struktur wacana dominan. Meskipun berbeda orientasi, keduanya menyumbang fondasi penting bagi pemahaman krisis sosial dan emansipasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis dialektis antara dua pendekatan tersebut diperlukan untuk membentuk model kritik sosial baru yang mampu menjawab tantangan konkret masyarakat digital. Model ini mengintegrasikan etika komunikatif dengan pengakuan terhadap partikularitas naratif dan representasi yang inklusif, serta menjunjung prinsip pluralistic emancipation sebagai dasar emansipasi sosial yang relevan dan aplikatif. Dalam hal ini, transformasi konseptual tidak hanya berarti perubahan wacana, tetapi juga pembentukan praktik sosial yang lebih reflektif, adil, dan transformatif dalam menghadapi kompleksitas zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, A. and Faraj, M. (2024). A profound irrationalism anchored in postmodernism: a study of harold pinter's the birthday party. *JLS*, 8(2), 270-284. <https://doi.org/10.25130/lang.8.2.13>
- Abdullah, N. and Chaudhry, A. (2018). Promoting social justice and equity through university education in pakistan. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 12(2). <https://doi.org/10.20429/ijstol.2018.120205>
- Afshari, P., Bayazidi, S., & Yazdani, S. (2023). Meta-synthesis as an original method to synthesize qualitative literature in chronic diseases: a narrative review. *Jundishapur Journal of Chronic Disease Care*, 13(2). <https://doi.org/10.5812/jjcdc-139621>
- Aidnik, M. and Jacobsen, M. (2019). The u-turn of utopia – utopia, socialism and modernity in zygmont bauman's social thought. *Irish Journal of Sociology*, 27(1), 22-43. <https://doi.org/10.1177/0791603519825827>
- Averina, K. and Hlebova, N. (2022). Value-motivational aspects social activity development at the higher education institution specialists. *Postmodern Openings*, 13(1 Sup1), 38-56. <https://doi.org/10.18662/po/13.1sup1/413>
- Bilić, P. (2018). A critique of the political economy of algorithms: a brief history of google's technological rationality. *Triplec Communication Capitalism & Critique*

- Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 16(1), 315-331. <https://doi.org/10.31269/vol16iss1pp315-331>
- Bowden, B. (2018). Work, wealth, and postmodernism.. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76180-0>
- Castillo, J. and Pueyo, R. (2023). Sex on camera: a postmodern feminist critique on pornography. Asian Journal of Education and Social Studies, 49(3), 29-46. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v49i31132>
- Cern, K. (2019). How reflective and critical norm-usage paves the way to the public power of judgement. International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale De Sémiotique Juridique, 33(1), 175-188. <https://doi.org/10.1007/s11196-019-09671-y>
- Drisko, J. (2019). Qualitative research synthesis: an appreciative and critical introduction. Qualitative Social Work, 19(4), 736-753. <https://doi.org/10.1177/1473325019848808>
- Evans, C., Abelson, J., Kates, N., Cavanagh, A., & Lavis, J. (2023). A multilevel framework for complex care: a critical interpretive synthesis. Health & Social Care in the Community, 2023, 1-14. <https://doi.org/10.1155/2023/4487200>
- Fenton, J. (2021). The “undeserving” narrative in child and family social work and how it is perpetuated by “progressive neoliberalism”: ideas for social work education. Societies, 11(4), 123. <https://doi.org/10.3390/soc11040123>
- Foucault, M. (1980). "Power/Knowledge"; Lyotard, J.F. (1979). "The Postmodern Condition"
- Grishaeva, E. and Busygin, A. (2023). ‘do i pray when listening to a recorded prayer?’: approval and critique of digital practices in the russian orthodox church. Convergence the International Journal of Research Into New Media Technologies, 30(5), 1797-1812. <https://doi.org/10.1177/13548565231216940>
- Habermas, J. (1984). "The Theory of Communicative Action"
- Harvey, V. (2023). The student voice in employability within tertiary business and management education., 80-98. <https://doi.org/10.4135/9781529791082.n7>
- Heysse, T. (2023). Power and normativity: rainer forst on noumenal power. Philosophy & Social Criticism, 50(8), 1175-1193. <https://doi.org/10.1177/01914537221150460>
- Hjelholt, M. (2024). The absorbent digital welfare state: silencing dissent, steering progress. Journal of Sociology, 60(3), 643-659. <https://doi.org/10.1177/14407833241253632>
- Honneth, A. (2018). The other of justice: habermas and the ethical challenge of postmodernism., 133-167. <https://doi.org/10.4324/9781315251288-5>
- Levin, L. (2019). Rethinking social justice: a contemporary challenge for social good. Research on Social Work Practice, 30(2), 186-195. <https://doi.org/10.1177/1049731519854161>

- Limenh, G. and Nouvet, É. (2024). The uptake of critical perspectives in the field of global mental health: a critical interpretive synthesis.. <https://doi.org/10.1101/2024.01.10.24301044>
- Lynch, C. (2019). Contesting digital futures: urban politics, alternative economies, and the movement for technological sovereignty in barcelona. *Antipode*, 52(3), 660-680. <https://doi.org/10.1111/anti.12522>
- Magis, C. (2018). Manual labour, intellectual labour and digital (academic) labour. the practice/theory debate in the digital humanities. *Triplec Communication Capitalism & Critique Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society*, 16(1), 159-175. <https://doi.org/10.31269/triplec.v16i1.847>
- Merawi, F. (2023). Limits of demythologization, critique of ideology, postmodern critique of reason and critique of the other: unsuccessful moments in the history of modern rationality. *E-Logos*, 30(2), 56-70. <https://doi.org/10.18267/j.e-logos.500>
- Muhamba, D. and Francis, B. (2023). Deconstructing reality: a postmodern analysis of the concept of truth. *Journal of African Politics*, 3(2), 31-42. <https://doi.org/10.58548/2023jap32.3142>
- O'Byrne, D. (2020). A contribution to building unified movements for the environment: aligning interests, forming alliances. *Human Geography*, 13(2), 127-138. <https://doi.org/10.1177/1942778620927391>
- Orchard, A., Sitoh, J., Wyatt, A., & Moore, M. (2023). Music in medical education: a critical interpretive synthesis. *Medical Education*, 58(5), 507-522. <https://doi.org/10.1111/medu.15255>
- Pillay, T. and Pillay, M. (2021). The power struggle: exploring the reality of clinical reasoning. *Health an Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health Illness and Medicine*, 27(4), 559-587. <https://doi.org/10.1177/13634593211054008>
- Place, K. and Ciszek, E. (2021). Troubling dialogue and digital media: a subaltern critique. *Social Media + Society*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120984449>
- Ratcliffe, J., Galdas, P., & Kanaan, M. (2020). Men and loneliness in the 'west': a critical interpretive synthesis.. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-17584/v1>
- Scheel, S. (2024). Epistemic domination by data extraction: questioning the use of biometrics and mobile phone data analysis in asylum procedures. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 50(9), 2289-2308. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2024.2307782>
- Sevim, E., Yildirim, Y., Ünsal, E., Dalmızrak, E., & Güntekin, B. (2025). Distinctive delta and theta responses in deductive and probabilistic reasoning. *Brain and Behavior*, 15(1). <https://doi.org/10.1002/brb3.70179>

- Shaw, J. and Donia, J. (2021). The sociotechnical ethics of digital health: a critique and extension of approaches from bioethics. *Frontiers in Digital Health*, 3. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.725088>
- Shubin, S. and Sowgat, T. (2019). Contested experiences and potential justice at the limit of the law for poor urban children in bangladesh. *Children S Geographies*, 18(5), 516-528. <https://doi.org/10.1080/14733285.2019.1630711>
- Taffel, S. (2021). Data and oil: metaphor, materiality and metabolic rifts. *New Media & Society*, 25(5), 980-998. <https://doi.org/10.1177/14614448211017887>
- Talseth, A. and Gilje, F. (2018). Responses of persons at risk of suicide: a critical interpretive synthesis. *Nursing Open*, 5(4), 469-483. <https://doi.org/10.1002/nop2.169>
- Vogelmann, F. (2021). One step forward, two steps back: idealism in critical theory. *Constellations*, 28(3), 322-336. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12548>
- Ward, S. and Budarick, J. (2020). Adapting to the postmodern medical paradigm: how the daily telegraph used emotion and anecdote to legitimise vaccination. *Media International Australia*, 181(1), 103-119. <https://doi.org/10.1177/1329878x20975786>
- Xia, B. (2021). Rethinking digital labour: a renewed critique moving beyond the exploitation paradigm. *The Economic and Labour Relations Review*, 32(3), 311-321. <https://doi.org/10.1177/10353046211038396>
- Zeli, A. (2024). Postmodern international relations: postmodernism beyond social constructivism. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 04(08). <https://doi.org/10.55677/ijssers/v04i8y2024-14>
- Zheng, M. and Guinote, A. (2022). Power triggers moral reasoning aligned with active goals and moral flexibility across contexts. *Scandinavian Journal of Psychology*, 64(3), 339-351. <https://doi.org/10.1111/sjop.12888>
- Zuboff, S. (2019). *"The Age of Surveillance Capitalism"*; Harari, Y.N. (2016). *"Homo Deus"*